

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIMODERASI OLEH TEKNOLOGI INFORMASI

Lidya Fitriani¹⁾, Agus Solikhin²⁾

Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Jambi^{1,2)}

Email : Lidif.1090@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi. Populasi dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada 22 Dinas dan 8 Badan, 9 Biro, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 2 Rumah Sakit Daerah, yang menjadi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD.

Kata kunci: *Kualitas LKPD, pengelolaan keuangan daerah, implementasi SIPD, dan teknologi informasi*

Abstract

This research aimed to explain the influence of implementation of the Regional Government Information System on the quality of Regional Government Financial Reports which is mediated by regional financial management and the ability of information technology to moderate the influence of SIPD implementation on regional financial management and the quality of LKPD of the Jambi Provincial Government. The population of this research are officials involved in the regional financial management process in 22 Departments and 8 Agencies, 9 Bureaus, 1 DPRD Secretariat, 1 Inspectorate, 2 Regional Hospitals, which are Regional Apparatus Organizations of the Jambi Provincial Government. Sampling in this research used a judgment sampling technique, namely selecting samples based on judgment, namely a non-random type of sample selection where the information obtained is generally adjusted to the research objectives or problems. Data analysis in this research was carried out using the Structural Equation Modeling (SEM) method using the Partial Least Square (PLS) approach. The research results showed that implementation of the Regional Government Information System had a direct influence on regional financial management and the quality of Regional Government Financial Reports. The results of this research also

showed that implementation of the Regional Government Information System had an indirect influence on the quality of Regional Government Financial Reports which was mediated by regional financial management. Meanwhile, information technology was able to moderate the influence of implementation of the Regional Government Information System on regional financial management and the quality of Regional Government Financial Reports.

Keywords: *Quality of Regional Government Financial Reports, regional financial management, implementation of the Regional Government Information System, and information technology*

1. LATAR BELAKANG

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Halim, dkk, 2012).

Fenomena yang terjadi saat ini sehubungan dengan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah memperlihatkan bahwa opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK bukan merupakan jaminan tidak adanya korupsi.

Setiap tahun bertambah jumlah peraih WTP di pemerintah Provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa laporan yang dibuat semakin membaik. Meskipun demikian laporan tersebut tidak menjamin pada substansi dari maksud laporan tersebut dibuat. Bahwa laporan tersebut semestinya terbebas dari praktik *mark up*, pemborosan, dan korupsi.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih banyaknya ditemukan ketidakpatutan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.524 permasalahan sebesar Rp2,35 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.020 permasalahan (BPK RI, 2022).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *tools* penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah yang dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Dewi et.al (2023) mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dari implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang juga ikut menentukan kualitas laporan keuangan yaitu dukungan teknologi informasi. Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI (2022) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menyebutkan bahwa faktor kurangnya dukungan teknologi informasi juga ikut mempengaruhi terjadinya kasus-kasus ketidakpatuhan dalam penyusunan LKPD. Informasi merupakan produk dari teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil putusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan menjadi lebih efektif.

Penelitian mengenai pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Dewi et.al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasi SIPD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan. Sementara itu, penelitian Wulandari dan Yuliati (2023) mengungkapkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penempatan variabel pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening yang menghubungkan pengaruh implementasi SIPD dengan kualitas LKPD. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia dan Suwondo (2023) mengungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, berdasarkan penelitian Vidyasari dan Suryono (2021) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan lainnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menempatkan variabel teknologi informasi sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wuldandari dan Yuliati (2023) dan Sarwono dan Handayani (2021) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Begitupun dengan penelitian Dwirini (2023) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi TI tidak berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan.

Masih adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menjadi alasan penggunaan OPD di Provinsi Jambi. Ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan masih terbatasnya dukungan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Kerangka IASB mendefinisikan tujuan laporan keuangan dan definisi ini diulang dalam *International Accounting Standard* (IAS) No.1 yaitu, “tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan juga menunjukkan hasil pengelolaan manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Definisi laporan keuangan menurut Baridwan (2010) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007) mengungkapkan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, juga segala kesatuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh daerah serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Menurut Darise (2009) “keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam upaya perwujudan good governance”.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Susanto (2013) mengungkapkan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sementara itu menurut Mulyadi (2010), sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut *pattern* atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Pengertian informasi menurut Romney dan Steinbart (2016) informasi adalah data yang telah diatur dan diolah untuk memberikan makna dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Hal yang sama dikatakan Gelinis et.al. (2018) bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Teknologi Informasi

Menurut Jogyanto (2008) teknologi Informasi (IT) adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sedangkan Kadir dan Triwahyuni (2003) teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomas *et.al.* (1991) dalam Wijaya (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya

yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (*input*), teknologi keluaran (*output*), teknologi perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpan (*storage*), teknologi telekomunikasi (*telecommunication*) dan teknologi mesin pemroses (*process*) (Kadir, 2005). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Hipotesis

1. H1: Implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. H2 : Implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.
3. H3 : Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.
4. H4 : Implementasi SIPD memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah
5. H5 : Teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi
6. H6 : Teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Singarimbun dan Effendi (2008) menjelaskan *explanatory research* yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013). Sampel diambil sebanyak dua orang tiap OPD yaitu Kepala OPD dan pejabat pada bagian keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk kepentingan penelitian. Data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data observasi lapangan dengan cara menyebarkan open kuesioner

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu angket/kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk ditujukan kepada responden. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai Implementasi SIPD (X), pengelolaan keuangan daerah (Y₁) dan

Kualitas LKDP (Y_2), dan Teknologi Informasi (Z). Jenis kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner tertutup dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memilih alternatif jawaban yang disediakan berdasarkan skala *Likert*.

Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk diisi.

Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2016), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *kovarian* menjadi berbasis *varian*. Keuntungan dengan menggunakan PLS adalah PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016). Analisis dilakukan dengan menggunakan alat bantu software SmartPLS versi terbaru yaitu versi 4.0 karena versi 4.0 ini dalam proses bootstrapping menunjukkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya.H

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pelaporan. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini yaitu sebanyak 861 kuesioner yang dibagikan ke 43 OPD di Provinsi Jambi. Semua kuesioner yang dikirimkan telah dikembalikan dan semuanya telah terisi dengan baik dan bisa diolah untuk kepentingan analisis data hasil penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Persepsi responden mengenai implementasi SIPD Pemerintah Provinsi Jambi tergolong cukup baik dengan skor rata-rata sebesar 281,00. Dari lima item pernyataan, semua item tergolong dalam kategori cukup baik. Nilai terendah yaitu terdapat pada pertanyaan mengenai Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meningkatkan kualitas output laporan keuangan pemerintah daerah dengan skor sebesar 275 dan dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi pada item mengenai penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjamin keamanan data laporan keuangan pemerintah daerah dengan skor 285 dan dalam kategori cukup baik.

Persepsi responden mengenai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi tergolong cukup baik dengan rata-rata skor sebesar 283,86. Dari tujuh pernyataan yang diajukan mengenai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi, semuanya tergolong dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi terdapat pada item yang menyatakan mengenai penggunaan input diperoleh dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga pasar dengan skor sebesar 287, sedangkan skor terendah terdapat pada item mengenai masyarakat bisa mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dengan dengan rata-rata skor sebesar 280.

Kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi tergolong cukup baik dengan rata-rata skor sebesar 272,89. Dari sembilan pernyataan yang diajukan mengenai kualitas LKPD, semua item dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi terdapat pada item yang menyatakan

informasi disajikan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus dengan skor sebesar 281, sedangkan skor terendah terdapat pada item mengenai laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu dengan dengan rata-rata skor sebesar 263.

Dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tergolong cukup baik dengan rata-rata skor sebesar 275,00. Skor tertinggi terdapat pada item yang menyatakan mengenai pemanfaatan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan dengan skor sebesar 276 dan dalam kategori cukup baik, sedangkan skor terendah terdapat pada item mengenai pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dengan skor sebesar 274.

Hasil Pengujian *Outer Model*

Menurut Hussein (2015), pengujian validitas menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dapat dilihat dari pengujian validitas *convergent* dan *discriminant*. Sementara itu, pengukuran reliabilitas dilihat dari hasil uji *composite reliability* dan *cronbach alpha*.

Validitas Konvergen

Nilai AVE pada masing-masing variabel laten lebih besar dari 0,5, yang berarti bahwa semua indikator pada masing-masing variabel laten mampu mengukur dengan baik variabel latennya.

Validitas Diskriminan

Nilai *loading factor* dengan masing-masing variabel latennya (angka yang dicetak tebal) lebih besar daripada nilai *loading factor* dengan variabel laten yang lain. Hal ini menyatakan bahwa semua indikator mampu mengukur dengan baik variabel latennya masing-masing.

Uji Reliabilitas

Nilai *composite reliability* pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap konstruk reliabel dan mampu menjelaskan dengan baik masing-masing variabel dimaksud. Nilai *cronbach alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa semua konstruk reliabel dan data hasil pengukuran semua indikator untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.

Hasil Pengujian *Inner Model (Evaluasi Model Struktural)*

Evaluasi *Inner Model* atau penilaian terhadap model struktural, dilakukan untuk memahami: nilai R Square (R²) (*Coefficient diterminance*), memvalidasi kebaikan model (*Model Fit*) dan *predictif relevan* (Q²) serta koefisien jalur (*path Coefficient*) (Duryadi, 2021).

Uji R-Square

- a. Nilai *R Square Adjusted* pada model dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel endogen yaitu pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,582. Nilai *R Square Adjusted* tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang moderat dari semua variabel eksogen (implementasi SIPD, teknologi informasi dan variabel moderator ZxX) terhadap pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa implementasi SIPD, teknologi informasi dan variabel moderator ZxX mampu menjelaskan pengelolaan keuangan daerah sebesar $0,5828 \times 100\% = 58,2\%$, dimana sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model.
- b. Nilai *R Square Adjusted* dengan kualitas LKPD sebagai variabel endogen yaitu pengaruh implementasi SIPD, teknologi informasi, variabel moderator ZxX dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,731. Nilai *R Square Adjusted* tersebut menunjukkan adanya

pengaruh yang kuat dari semua variabel eksogen terhadap kualitas LKDP secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa implementasi SIPD, teknologi informasi, variabel moderator ZxX dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan kualitas LKDP sebesar $0,731 \times 100\% = 73,1\%$, dimana sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model.

Predictif Relevan

Pada perhitungan nilai *predictive - relevance* diperoleh nilai sebesar 0,8876 atau 89% memperlihatkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 89%. Sisa 11% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terkandung dalam model dan error.

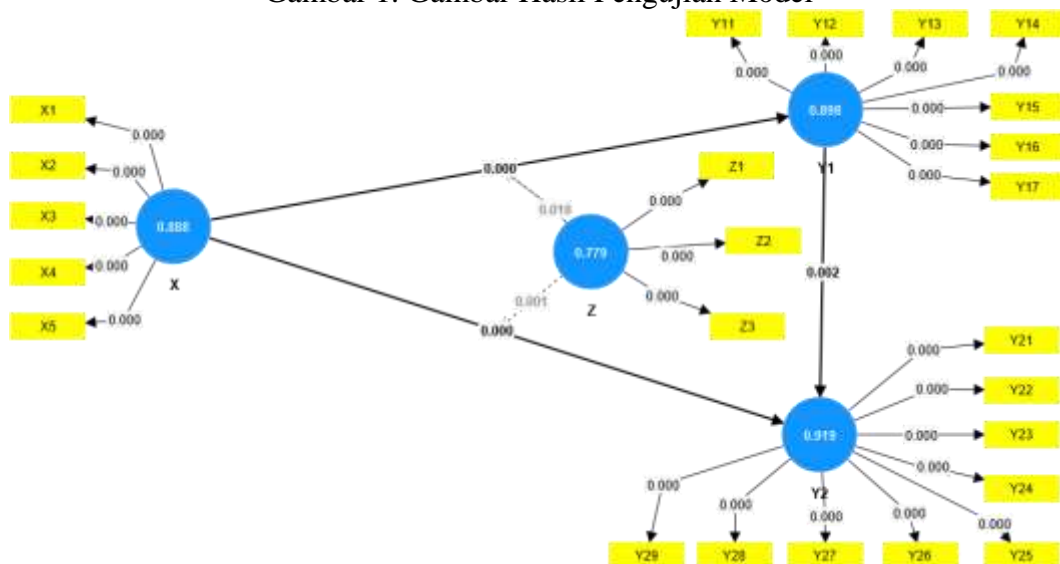
Size Effect f²

Interpretasi nilai f², dimana besarnya pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah tergolong ke dalam pengaruh besar, sedangkan untuk pengaruh pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKDP tergolong sedang atau medium. Sementara itu, pengaruh moderasi teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKDP tergolong ke dalam pengaruh kecil.

Koefisien Path

Hasil *Path Coefficients* digunakan dalam memvalidasi hipotesis pengaruh langsung antar variabel. berdasarkan data tersebut dapat diperoleh bahwa nilai *orginal* sampel antar variabel adalah sebagai berikut: Implementasi SIPDP - pengelolaan Keuangan Daerah (0,528), Implementasi SIPD - Kualitas Keuangan Daerah (0,431), Pengelolaan Keuangan Daerah - kualitas keuangan daerah (0.307), Teknologi Informasi - Pengelolaan keuangan Daerah (0.389), teknologi informasi - kualitas laporan keuangan (0,309), teknologi informasi x implementasi SIPD - pengelolaan keuangan Daerah (0.090), teknologi informasi x implementasi SIPD - kualitas keuangan Daerah (0,138).

Gambar 1. Gambar Hasil Pengujian Model



Uji Hipotesis

Pengaruh Langsung Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas LKDP

- a. Pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah (X -> Y1) dengan koefisien path bernilai positif sebesar 0,528, yang berarti bahwa setiap peningkatan

- implementasi SIPD akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan besarnya pengaruh sebesar $(0,528)^2 \times 100\% = 27,878\%$.
- b. Pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD ($X \rightarrow Y_2$) dengan koefisien path bernilai positif sebesar 0,431, yang berarti setiap peningkatan implementasi SIPD akan meningkatkan kualitas LKPD dengan besarnya pengaruh sebesar $(0,431)^2 \times 100\% = 18,576\%$.
 - c. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD ($Y_1 \rightarrow Y_2$) dengan koefisien path bernilai positif sebesar 0,307, yang berarti setiap peningkatan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas LKPD dengan besarnya pengaruh sebesar $(0,307)^2 \times 100\% = 9,425\%$.

Pengaruh Tidak Langsung Implementasi SIPD terhadap Kualitas LKPD yang Dimediasi oleh Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh implementasi SIPD secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah ($X \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$) dengan nilai koefisien path bernilai positif sebesar 0,162. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh tidak langsung implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah sebesar $(0,162)^2 \times 100\% = 2,624\%$.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah dengan nilai *p-value* sebesar 0,016 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian implementasi SIPD memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas LKPD

- a. Pengaruh moderasi teknologi informasi terhadap hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah ($Z \times X \rightarrow Y_1$) dengan koefisien path bernilai positif sebesar 0,090, yang berarti bahwa setiap peningkatan interaksi antara teknologi informasi dan implementasi SIPD akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan besarnya pengaruh sebesar $(0,090)^2 \times 100\% = 0,81\%$.
- b. Pengaruh moderasi teknologi informasi terhadap hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas LKPD ($Z \times X \rightarrow Y_2$) dengan koefisien path bernilai positif sebesar 0,138, yang berarti bahwa setiap peningkatan interaksi antara teknologi informasi dan implementasi SIPD akan meningkatkan kualitas LKPD dengan besarnya pengaruh sebesar $(0,138)^2 \times 100\% = 1,904\%$.

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Kemampuan teknologi informasi (Z) dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD (X) terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y1) dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel moderator $Z \times X$ terhadap Y1. Nilai *p-value* sebesar 0,038 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- b. Kemampuan teknologi informasi (Z) dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD (X) terhadap kualitas LKPD (Y2) dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel moderator $Z \times X$ terhadap Y2. Nilai *p-value* sebesar 0,042 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jambi dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et.al. (2023) yang mengungkapkan bahwa variabel implementasi SIPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Tumija et.al., (2023) mengungkapkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.

Sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan sistem informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sementara itu, pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang juga lebih kecil dari taraf signifikan 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Yuliati (2023) yang mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum dan Mahirun (2021) mengungkapkan bahwa Implementasi SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Implementasi SIPD sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan lebih handal dan tepat waktu dalam penyampaiannya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & Nurwani, 2021). Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Pengembangan sistem informasi yang mempunyai kekuatan fitur yang handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan juga mempunyai integrasi yang tinggi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait akan membantu proses penyusunan laporan keuangan menjadi akurat. Melalui implementasi SIPD, maka laporan yang dihasilkan akan menyediakan informasi keuangan di dalam pelaporan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan konsisten (Kusumaningrum, 2010).

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD di Pemerintah Provinsi Jambi dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia dan Suwondo (2023) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dapat mendukung aspek-aspek laporan keuangan untuk memiliki kualitas yang baik. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Vidyasari dan Suwondo (2021) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 66 Ayat 1, mengungkapkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Arisman, 2018).

Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kualitas LKPD yang Dimediasi oleh Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dari implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung yang menunjukkan bahwa nilai *p-value* pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa dengan adanya peningkatan dalam pengimplementasian sistem informasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal. Kondisi tersebut memberikan dorongan yang kuat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari sistem pelaporan yang baik. Melalui penguatan sistem pelaporan, diharapkan upaya perbaikan

kinerja instansi pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu, sistem pelaporan yang baik dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi terhadap Hubungan Antara Implementasi SIPD dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan teknologi informasi memberikan dampak terhadap implementasi SIPD sehingga dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah dengan nilai p-value sebesar 0,016 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, dukungan teknologi informasi memperkuat hubungan antara pengimplementasian SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi terhadap Hubungan Antara Implementasi SIPD dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi informasi memberikan dampak terhadap implementasi SIPD sehingga dapat meningkatkan kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas LKPD dengan nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, dukungan teknologi informasi memperkuat hubungan antara pengimplementasian SIPD dengan kualitas LKPD.

Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Teknologi informasi juga meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan ke pengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas LKPD sehingga teknologi informasi mampu memperkuat pengaruh penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi .
2. Implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi
3. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi .
4. Implementasi SIPD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah.
5. Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah
6. Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas LKPD.

Saran

Bagi Pemerintah Provinsi Jambi supaya meningkatkan implementasi SIPD dan dukungan teknologi informasi sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas LKPD.

Bagi peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian dengan subjek penelitian yang lebih beragam misalnya dengan menggunakan populasi yang lebih luas bukan hanya di Pemerintah Provinsi Jambi.

Peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas LKPD seperti kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., dan Suwondo, S. (2023). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 4, No. 1, October 2023, pp. 79 – 89.
- Arisman. (2018). Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Dan Hubungannya Dengan Lakip SKPD Di Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 54–69.
- Abdul Halim dkk, 2012, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4), Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Abdul Kadir dan Terra Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi. Yogyakarta
- Baridwan, Zaki. 2010. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi 5. Yogyakarta: BPPE.
- Dewi, M., Sumiati, N., dan Suryaman, W. (2023). "Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi". *Jurnal Professional*, Vol. 10 No. 2, Desember 2023 page: 621 – 624
- Dwirini (2023). "Modernisasi Teknologi Informasi dan SAP Pada Laporan Keuangan Di Moderasi Kapasitas SDM". Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 7 Nomor 2, April 2023 DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1361>
- Vidyasari, F.N., dan Suryono, B. (2021). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 10, Nomor 4, April 2021

- Wulandari, A.D., dan Yuliati, A. (2023), “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jember)”, *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023
- Wijaya, A. (2007). Penggunaan DFD dan ERD pada analisis dan perancang sistem informasi penjualan suku cadang dan pelayanan service pada PT. Mitra Maju Mobilindo. Jurnal teknik industri : media keilmuan dan kaitan aplikasi bidang teknik industri.
- Wilkinson, Joseph W., et.al. 2000. Accounting Information Systems. Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons